

## CERITA WARGA

Semarang - Bu Ani, anggota Komunitas Candi (Kendi) mendapatkan kabar mengejutkan. Tetangganya, Ibu Silvywarga di RW I Kel. Candi diinformasikan sedang hamil yang usia kandungan lebih dari 10 bulan, tanda-tanda mau melahirkan sudah terlihat. Kandungan ini merupakan anak kedua dari bu Silvy.

Senin, 29 Agustus 2016 proses meminta rujukan ke puskesmas Kagok menemui halangan, puskesmas tidak mau memberikan rujukan karena si ibu belum pernah periksa. Memang Bu Silvy biasanya periksa di Rumah Zakat namun kalau operasi sesar tidak docover, sedangkan tidak bisa juga di RS Pantiwiloso karena tidak ada biaya. Bu Ani berfikir klo tidak segera ditangani bisa beresiko. Sebagai informasi Kota Semarang peringkat 2 Angka Kematian Ibu tertinggi di Jawa Tengah.

Dengan sigap bu Ani langsung diskusi dengan komunitas tentang kondisi terupdate. Kemudian mendatangi Lurah candi untuk menceritakan kondisi dan meminta surat permohonan ke puskesmas untuk meminta surat rujukan. Dengan surat itu puskesmas pun memberikan surat rujukan ke RSUD Kota Semarang. Keesokan hari bu Silvy akhirnya melahirkan dengan selamat dan bayi pun sehat (Amri)

## SAPA REDAKSI

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan keberkahan-Nya hingga akhirnya buletin Synergie edisi III Oktober – Desember 2016 ini bisa terbit.

Rekan – rekan pembaca pada edisi kali ini buletin Synergie mengulas tentang kegiatan TOT fasilitator musrenbang tahun 2017 yang dilaksanakan kerjasama PATTIRO Semarang dan BAPPEDA Kota Semarang. Selain itu buletin edisi kali ini juga akan mengulas kegiatan Sekolah Relawan Integritas serta upaya mendorong pencegahan korupsi melalui sistem integritas lokal di kota Semarang. Selamat membaca.

## PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS POTENSI WARGA



Dok. Pattiro Semarang

Dalam rangka memperkuat peran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang 2017, BAPPEDA Kota Semarang bekerjasama dengan PATTIRO Semarang dalam melaksanakan *Training of Trainer (TOT)* Fasilitator musrenbang. Kegiatan yang dilaksanakan dua tahap pada tanggal 3, 4 dan 17, 18 Desember 2016 di Gd. Moch. Ichsan Balaikota, dengan fasilitator Widi Nugroho, Dini Inayati, Widi Heriyanto dan Dwi Yunita Prismawati.

Kegiatan yang diikuti oleh 177 ketua LPMK Kelurahan dan 16 koordinator LPMK Kecamatan pada tahun ini mengubah metode pendekatan sosial *Problem Solving* menjadi *Apresiasi Inquiry (AI)*. Kelebihan pendekatan AI diantaranya dengan menyadarkan masyarakat capaian terbaik yang pernah dilakukan dengan menggerakkan potensi – potensi sumber daya yang ada. Masyarakat diajak menyusun sebuah visi pembangunan wilayah yang tentunya terintegrasi dengan visi pembangunan di tingkat kota.

“Perubahan pendekatan ini akan kita sesuaikan dengan merevisi peraturan Walikota no 32 tahun 2015 (Pedoman teknis musrenbang) supaya implementatif dilapangan” Ujar Ir. Purnomo DS (Sekertaris Bappeda). Peserta sendiri sangat antusias dalam acara ini, terbukti dengan berbagai macam pertanyaan yang dilontarkan kepada fasilitator dan aktif dalam simulasi musrenbang. “Selama ini kami belum menyadari ternyata banyak potensi yang bisa dioptimalkan di lingkungan Kel. Bangetayu Wetan. Kami akan coba data untuk mendukung impian bangetayu Wetan kelurahan sehat”(DR)

## SUSUNAN REDAKSI

Penanggungjawab: *Widi Nugroho*  
Editor: Devi Riyawati

Kontributor: Amrinalfi Khair, Devi Riyawati  
Layouter: Ella cm

ALAMAT REDAKSI: Jl. Durian IV No 21 Kel Lamper Kidul, Kec Semarang Selatan, Semarang 50249  
Telp/Fax: (024) 8445532, Email: pattiro\_semarang@yahoo.com

KUNJUNGI KAMI

Pattiro Semarang [www.pattirosemarang.org](http://www.pattirosemarang.org)

## REKRUTMEN PEGIAT SOSIAL BARU PATTIRO SEMARANG



Dok. Pattiro Semarang

Salah satu tantangan otonomi daerah pasca reformasi adalah bagaimana masyarakat sipil terlibat aktif dalam melakukan pemantauan layanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah. Pemantauan diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah sudah partisipatif, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan aktif masyarakat sipil dibarengi pengetahuan, informasi yang lengkap, pengalaman teknis yang matang akan mendorong perbaikan layanan menjadi lebih baik.

Untuk mencapai hal tersebut, PATTIRO Semarang mengadakan Sekolah Relawan Integritas (SELARAS). Kegiatan ini dilaksanakan 28 - 30 November 2016 di aula Dinas Pendidikan ini ditujukan mencari calon – calon pegiat sosial muda, kritis, bersemangat dalam belajar dan tentunya memiliki integritas masa depan. 15 peserta yang terpilih terdiri dari berbagai kampus seperti Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, UIN Walisongo, UNIKA Soegijapranoto, Universitas PGRI Semarang, Universitas Wachid Hasyim telah menyisih 30 calon peserta lain.

Dadang Trisasongko (Sekjen TI Indonesia) dalam penyampaian materinya menjelaskan, “Riset yang dilakukan TII, harga barang yang dijual saat ini 30% nya merupakan ongkos untuk menyuap. Diperlukan banyak orang jujur yang kritis untuk terus menyuarakan masalah-masalah seperti ini”. Di Sesi lain Danardono S dari Sekretariat OGI menyampaikan pentingnya mensinergiskan perkembangan teknologi Informasi dengan dorongan reformasi birokrasi misalnya dengan kebijakan keterbukaan informasi melalui open data. Hadir juga narasumber yang lain seperti Andreas P (UNIKA Soegijapranoto), Budi Setiyono (UNDIP), Widi Heriyanto (Sinergantara), Rahmatbowo S (UNISSULA), Dini Inayati (PATTIRO Semarang), Rofiudin (AJI Semarang).

Peserta terlihat sangat antusias di kegiatan ini, Cuher (Mhs Undip) menyampaikan kegelisahan setelah mengetahui kompleksnya permasalahan di negara ini setelah mendapatkan materi dari narasumber. “Harus ada yang mulai untuk merubah kondisi seperti saat ini” tegasnya. Sedangkan Syofii (Mhs Unnes) mengungkapkan sangat senang dengan proses diskusi dalam kegiatan Selaras, “forumnya serius tapi santai, semua peserta terlibat aktif memberikan pendapat, dengan pembicara yang mumpuni di masing-masing bidang. Sebagai rencana tindak lanjut setelah training, peserta akan diterjunkan ke komunitas dampingan PATTIRO Semarang untuk mendalami peta masalah yang sebenarnya ada di masyarakat (DR)

## MENDORONG SISTEM INTEGRITAS LOKAL DI KOTA SEMARANG



Dok. Pattiro Semarang

Bergesernya tanggung jawab implementasi dan pengawasan tata kelola pemerintahan pasca penerapan desentralisasi fiskal dari Nasional ke Daerah juga ikut menggeser resiko korupsinya. Data dari KPK, kasus hukum 343 kepala daerah, 2.545 anggota DPRD provinsi, 431 DPRD Kab/kota di 10 tahun terakhir (2004-2014) memperkuat argumen diatas. Salah satu upaya PATTIRO Semarang dalam meningkatkan peran, kapasitas dan efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah dengan memperkuat sistem integritas lokal (SIL). Adapun bentuk penguatan SIL adalah melalui peningkatan efektifitas unsurpenyusun sistem yang meliputi aktor kunci lokal dalam fungsi pengawasan – akuntabilitas untuk menurunkan risiko korupsi di daerah.

Dipaparkan oleh Dini Inayati (peneliti PATTIRO Semarang) dalam *Focus Group Discussion (FGD)*, hasil assesment SIL bulan Juni – Oktober 2016 terlihat bahwa pemkot Semarang masih banyak celah yang berpotensi korupsi. Beberapa diantaranya adalah lemahnya pengawasan kinerja pegawai (3 tahun terakhir SILPA lebih dari 1 Trilyun), penyajian informasi yang belum cukup informatif, pencegahan konflik kepentingan, ruang abu-abu proses pengadaan. Sedangkan temuan di DPRD terkait fungsi pengawasan dan sebagai representasi politik masyarakat.

Ditambahkan oleh Wawan Suyatmiko dari TI Indonesia, “Penilaian IPK tahun 2015 di 11 kota, kota Semarang berada di urutan 3 dengan nilai 60 dengan kategori baik, namun ketika responden ditanya harapan di masa depan, mereka memberikan nilai 60 artinya stagnan, tidak ada harapan adanya perbaikan. Hasil assesment SIL memperkuat hasil penilaian IPK tersebut. Pemkot harus segera berbenah”. Nana Storada mewakili Walikota Semarang menyampaikan mayoritas peserta (Polrestabes, Kejaksaan, PN, Pemkot Semarang, DPRD kota Semarang, LSM, Media) mengakui hasil assesment LIS ini artinya memang ini menjadi potensi masalah korupsi di kota Semarang kedepan. Rekomendasi LIS akan menjadi data penting dalam pengambilan kebijakan Walikota dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.(WN)